



Judul : Komisi IV DPR dorong KLHK kawal alokasi DAK lingkungan
Tanggal : Selasa, 27 September 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Komisi IV DPR Dorong KLHK Kawal Alokasi DAK Lingkungan

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta untuk mengawal penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas pengusulan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk tahun anggaran 2023 dan 2024.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini membacakan hasil kesimpulan rapat kerja Komisi IV dengan KLHK di Jakarta, kemarin.

"Komisi IV DPR mendukung KLHK untuk mengembangkan mekanisme DAK fisik penugasan KLHK dalam proses politik di eksekutif maupun legislatif, dengan masukan dari Komisi IV DPR untuk DAK tahun 2024 selambat-lambatnya pada Januari 2023," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan bahwa usulan DAK fisik penugasan bidang lingkungan hidup untuk 2024 ialah sebesar Rp2,25 triliun.

Dana itu diusulkan untuk kepentingan beberapa isu, yaitu pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pendukung, untuk sarana dan prasarana pendukung penurunan beban pencemaran, sistem peringatan dini pengendalian bencana lingkungan hidup, dan pengelolaan taman kehati.

Menteri Siti menyoroti bahwa proses politik merupakan salah satu kunci dari pelaksanaan DAK, dengan penyiapan mekanisme DAK dilakukan lebih cepat.

"Tentang DAK kami berterima kasih. Memang akhirnya yang dibutuhkan adalah proses politik, kami mohon titip, proses politik akhirnya kuncinya," ujarnya.

Komisi IV DPR kemarin juga menyetujui pagu anggaran untuk KLHK tahun 2023 senilai Rp6,9 triliun.

Anggaran belanja KLHK 2023 mencakup alokasi anggaran

untuk Setjen Rp453 miliar, Inspektorat Jenderal Rp93 miliar, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Rp257 miliar, serta Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Rp1,36 triliun.

Selanjutnya, Ditjen Konservasi SDA dan Ekosistem sebesar Rp1,68 triliun, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Rp643 miliar, Badan Standardisasi Instrumen LHK Rp227 miliar, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Rp296 miliar.

Alokasi anggaran untuk Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp300 miliar, Ditjen Gakum LHK Rp340 miliar, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Rp291 miliar, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Rp203 miliar, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Rp380 miliar, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp381 miliar. (Fal/H-1)